



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## HARGA KOMODITAS ENERGI MENINGKAT, SUBSIDI ENERGI DI APBN 2022 DITAMBAH

**Niken Paramita Purwanto**  
Peneliti Muda  
[niken.paramita@dpr.go.id](mailto:niken.paramita@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Dunia tengah menghadapi tantangan berat, yaitu inflasi global yang tinggi, suku bunga tinggi, dan potensi pelemahan ekonomi yang semakin berat. Tiga hal ini sangat memengaruhi lingkungan ekonomi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pemulihan ekonomi dunia pun dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah, terutama akibat krisis global yang meningkat yang berasal dari geopolitik, yaitu perang di Ukraina yang telah menimbulkan *spillover* dalam bentuk kenaikan harga barang-barang terutama energi dan pangan, serta terjadinya *supply disruption*.

Sejumlah komoditas yang melonjak harganya adalah gas alam yang meningkat sebesar 125,8%, batu bara 166,1%, minyak mentah *brent* 45,7%, CPO 20,9%, gandum 55,6%, jagung 31,6%, kedelai 28,1%, dan *grain* 15,5%. Kenaikan harga komoditas akhirnya memicu inflasi tinggi. Namun inflasi di Indonesia dinilai masih terkendali karena tidak semua kenaikan harga komoditas dunia dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Kebijakan Pemerintah dalam merespons kenaikan harga komoditas adalah dengan fokus menjaga pemulihan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan menjaga kesehatan APBN melalui revisi APBN. Perubahan APBN 2022 disampaikan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Keuangan. Kinerja APBN 2022 dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi berjalan cukup baik. Dari sisi pendapatan, realisasi pada April tumbuh sebesar 45,9% dari periode sama tahun lalu atau sebesar Rp584,9 triliun. Penerimaan pajak sebesar Rp567,7 triliun (tumbuh 51,5 %) dan penerimaan bea cukai sebesar Rp108,4 triliun (tumbuh 37,7% dari realisasi Maret 2022) merupakan penyumbang terbesar APBN berjalan. Kinerja Belanja negara juga tercatat membaik. Belanja Pemerintah pusat misalnya, telah tumbuh sebesar 3,7% dari Rp489,8 triliun di April 2021 menjadi Rp508 triliun di April 2022. Sedangkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa tumbuh 4% dari Rp233,2 triliun menjadi Rp242,2 triliun di April 2022. Akselerasi ini mengindikasikan pemulihan ekonomi di Indonesia berlanjut sehingga APBN akan menjaga momentum ini.

Pemerintah meminta tambahan belanja Rp392,2 triliun dari Rp2.714,2 triliun menjadi Rp3.106,4 triliun. Kenaikan belanja tersebut digunakan untuk tambahan subsidi BBM, elpiji, dan listrik yang diperkirakan sebesar Rp74,9 triliun. Serta tambahan kompensasi BBM sebesar Rp234 triliun dan kompensasi listrik sebesar Rp41 triliun. Asumsi harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian crude price/ICP*) yang digunakan pemerintah dalam APBN 2022 adalah US\$63 per barel. Namun, saat ini harga ICP bahkan sudah menyentuh US\$102,5 per barel. Diperlukan penyesuaian pagu subsidi dan kompensasi agar keuangan BUMN di bidang energi seperti Pertamina dan PLN tidak merugi sehingga ketersediaan energi di Indonesia dapat terjaga.

Dengan adanya dukungan dari DPR RI untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi, pemerintah memastikan bahwa harga komoditas energi yang disubsidi pemerintah tidak akan naik dan membebani rakyat dengan persoalan pangan dan energi global. Peningkatan belanja tersebut sedianya akan diikuti lonjakan pendapatan sebesar Rp420 triliun. Dengan adanya tambahan subsidi dan kompensasi energi justru akan menekan defisit APBN dikarenakan potensi kenaikan harga BBM dan elpiji mengecil sehingga risiko kenaikan inflasi hingga akhir tahun juga berkurang. Pemerintah juga akan melakukan reformasi subsidi energi melalui transisi energi menuju pemulihan dan produktivitas berkelanjutan, yakni dengan memperkuat energi bersih global dan juga transisi yang adil. Hal ini bertujuan melindungi masyarakat miskin dan rentan melalui mekanisme semacam bantuan *cash transfer* sehingga daya beli masyarakat miskin dan rentan tetap terjaga.

## Atensi DPR

Salah satu prioritas besar dalam penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2022 yang perlu mendapat perhatian khusus oleh DPR RI, khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset, inovasi, dan industri dalam rangka menjaga pemulihan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan menjaga kesehatan APBN adalah dengan melakukan fungsi pengawasan, yang memastikan pemerintah terus berupaya memperbaiki kebijakan subsidi energi. Pada prinsipnya adalah memastikan bahwa subsidi energi tersebut tepat sasaran dan transisi energi menuju pemulihan dan produktivitas berkelanjutan, yakni dengan memperkuat energi bersih global dan juga transisi yang adil.

## Sumber

*Media Indonesia*, 23 & 24 Mei 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Dian Cahyaningrum  
Riyadi Santoso  
Rafika Sari  
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
Nur Sholikh P.S.  
Fieka Nurul A.